

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KOTA KUPANG

Meyulinda Aviana Elim^{1*}, Deasy Susana Ndaparoka², Thobias Elianus David
Tomasowa³

^{1:2:3}) Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang

*E-mail: meyulinda.aviana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pada OPD di Kota Kupang. Sampel penelitian adalah responden yang menduduki jabatan di bidang yang berkaitan dengan anggaran, diantaranya adalah pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penandatanganan surat perintah membayar dan bendahara pengeluaran pada OPD di Kota Kupang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan alat analisis regresi linear berganda. Variabel dalam penelitian ini adalah lima variabel independen dan satu variabel dependen, yaitu: perencanaan anggaran (X1), pelaksanaan anggaran (X2), pengadaan barang dan jasa (X3), komitmen manajemen (X4), lingkungan birokrasi (X5), sedangkan satu variabel dependen adalah penyerapan anggaran (Y).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja pada OPD di Kota Kupang.

Kata Kunci: Penyerapan Anggaran, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi

PENDAHULUAN

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran

belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Menurut Bastian (2006), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 menyebutkan bahwa penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja atas aspek

implementasi. Penyerapan anggaran juga merupakan salah satu unsur akuntabilitas keuangan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Di Indonesia, lambatnya penyerapan anggaran menjadi masalah klasik yang terus terjadi setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada lambatnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Fenomena ini juga terjadi pada Pemerintah Kota Kupang. Sebagai gambaran, selama periode tahun anggaran 2015-2017, di laporan realisasi anggaran pemerintah daerah mencatat hampir setiap tahun anggaran ada dana yang tidak terealisasi di kas daerah.

Kegagalan target penyerapan anggaran berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semua dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur (BPKP, 2011). Berdasarkan teori dan beberapa penelitian terdahulu (Darmanegara, 2010; Kuswoyo, 2011; Halim&Kusufi, 2012; Juliani, 2014), faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran antara lain perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi.

Penyerapan anggaran yang terlambat ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah terutama untuk jenis belanja barang dan belanja modal. Belanja tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu (Darmanegara,

2010; Kuswoyo, 2011; Halim&Kusufi, 2012; Herryanto, 2012; Juliani, 2014) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada pemerintah daerah. Dari hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, diantaranya adalah faktor Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, Administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM), Dokumen Pengadaan, Ganti Uang Persediaan (GUP), Komitmen Manajemen, Birokrasi. Pada penelitian ini, peneliti menyoroti beberapa faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi penyerapan anggaran, diantaranya perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi.

Fenomena “keterlambatan atau tidak maksimalnya penyerapan anggaran pemerintah daerah” yang masih menjadi persoalan klasik pemerintah daerah, menjadi alasan peneliti tertarik untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada SKPD di pemerintah Kota Kupang. Hal ini dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi pemerintah daerah Kota Kupang agar dapat memperbaiki sistem dan prosedur penyerapan anggaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan studi kasus pada Pemerintah Daerah Kota Kupang dengan memfokuskan pada Penyerapan Anggaran di OPD. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Responden dalam penelitian adalah pejabat yang menduduki jabatan di bidang yang berkaitan dengan anggaran, diantaranya adalah pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan,

pejabat penandatanganan surat perintah membayar dan bendahara pengeluaran pada OPDdi Kota Kupang. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 80 responden yang terdiri dari 4 orang per OPD dengan jumlah 20 OPD, yang terdiri dari 1 orang Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), 1 orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 1 orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan 1 orang Bendahara Pengeluaran.

Variabel dalam penelitian initerdiri dari lima variabel independen dan satu variabel dependen, yaitu: perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen, lingkungan birokrasi, sebagai variable independen, sedangkan satu variabel dependen adalah penyerapan anggaran. Masing-masing variabel diukur berdasarkan instrumen pertanyaan yang dibuat dengan skala likert 5 poin untuk semua variabel tersebut. **Perencanaan anggaran**, diukur dengan indikator penyusunan RKA, penetapan rancangan APBD, penetapan APBD, dengan menggunakan 7 (tujuh) pernyataan. **Pelaksanaan anggaran**, diukur dengan indikator penunjukan SK pejabat perbendaharaan, budaya kerja, proses penyelesaian administrasi, jadwal anggaran kas, proses verifikasi SPM, dengan menggunakan 8 (delapan) pernyataan.

Variabel **Pengadaan barang jasa**, diukur dengan indikator jumlah pejabat/panitia pengadaan barang jasa, pemahaman peraturan, pembentukan struktur organisasi pengadaan barang jasa, penentuan harga perkiraan sendiri (HPS), pemilihan penyedia barang jasa, dengan menggunakan 8 (delapan) pernyataan. **Komitmen**, manajemen diukur dengan indikator mencapai target penyerapan, mendukung pelatihan terkait (perencanaan, pengelolaan

keuangan, pengadaan barang jasa), memberikan solusi atas persoalan yang terjadi disatukan kerja, dengan menggunakan 6 (enam) pernyataan.

Lingkungan birokrasi, diukur dengan indikator koordinasi antar pegawai terjalin dengan baik, jumlah pegawai yang terlibat terkait pengelolaan keuangan dan pengadaan barang jasa mencukupi, pemahaman peraturan, dengan menggunakan 7 (tujuh) pernyataan. Teknik analisis data menggunakan alat analisis regresi linier berganda, dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan data yang digunakan memenuhi syarat-syarat asumsi klasik. Model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4 + \beta_5.X_5 + e$$

Dimana:

Y = Penyerapan Anggaran

a = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi X_1

β_2 = Koefisien regresi X_2

β_3 = Koefisien regresi X_3

β_4 = Koefisien regresi X_4

β_5 = Koefisien regresi X_5

X_1 = Dokumen perencanaan anggaran

X_2 = Pelaksanaan anggaran

X_3 = Dokumen pengadaan barang dan jasa

X_4 = Komitmen manajemen

X_5 = Birokrasi

e = error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas instrumen pertanyaan menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pernyataan dengan skor total. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pernyataan dengan skor total mempunyai tingkat signifikansi $< 0,05$, maka butir pernyataan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya (Sugiyono, 2012).

Semua item pernyataan untuk variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi dinyatakan valid dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Hal ini berarti semua instrumen pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan semua variabel yang diukur pada kuesioner tersebut.

Uji reliabilitas atas instrumen pertanyaan menggunakan teknik *Cronbach Alpha*. Jika nilai koefisien alpha $> 0,60$ maka disimpulkan bahwa instrumen pertanyaan tersebut handal atau *reliable* (Ghozali, 2005). Berdasarkan uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* seperti tersaji pada tabel 1.

Tabel 1. Nilai *Cronbach's Alpha* Variabel Penelitian

Instrumen Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Hasil
Perencanaan Anggaran (X1)	0,898	<i>reliable</i>
Pelaksanaan Anggaran (X2)	0,688	<i>reliable</i>
Pengadaan Barang dan Jasa (X3)	0,837	<i>reliable</i>
Komitmen Manajemen (X4)	0,883	<i>reliable</i>
Lingkungan Birokrasi (X5)	0,827	<i>reliable</i>
Penyerapan Anggaran (Y)	0,801	<i>reliable</i>

Sumber: Data diolah

Dengan demikian pengukuran kuesioner semua instrument pertanyaan atas variable penelitian ini *reliable* karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan grafik P-Plot SPSS dan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*. Untuk uji pola penyebaran P-Plot, jika titik-titik data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal maka dapat dikatakan data

berdistribusi normal. Sedangkan pada uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* akan dilihat nilai signifikansinya apabila lebih dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal (Ghozali, 2005). Berdasarkan uji normalitas dengan grafik P-Plot SPSS, didapatkan bahwa titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Berdasarkan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* dilihat bahwa nilai *asympt.sig (2-tailed)* atau signifikansi sebesar 0,722 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal. Dengan demikian model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF < 10 dan *tolerance* $> 0,1$ maka variabel independen terbebas dari persoalan multikolinieritas (Priyatno, 2013). Hasil uji SPSS menunjukkan bahwa semua nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 .

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Heterokedastisitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas, yaitu seras titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Selain itu, heterokedastisitas dapat diketahui melalui uji *Glesjer*. Jika probabilitas masing-masing variabel independen $> 0,05$, maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2006).

Hasil uji menunjukkan bahwa pada scatterplot, titik-titik yang ada tidak membentuk sebuah pola namun menyebar, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tidak terjadi heterokedastisitas. Selain itu melalui uji *Glesjer* nilai signifikansi masing-masing variabel $> 0,05$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi yang dipakai telah memenuhi asumsi klasik sehingga dapat dilanjutkan dengan analisis regresi berganda. Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran (X1), pelaksanaan anggaran (X2), pengadaan barang jasa (X3), komitmen manajemen (X4), lingkungan birokrasi (X5), dan terhadap penyerapan anggaran (Y).

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dengan uji F (*Fisher Test*) dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Dilihat dari nilai signifikansi menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah $0,000 < 0,05$ sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu penyerapan anggaran.

Pengujian hipotesis dengan uji t dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing (parsial) variabel independen secara individual

terhadap variabel dependen. Uji t juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi (ρ value), dan signifikansi sebesar $0,012 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, sehingga terbukti bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran, nilai signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak, sehingga terbukti bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Pengaruh pengadaan barang jasa terhadap penyerapan anggaran, nilai signifikansi sebesar $0,034 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 diterima dan H_0 ditolak, sehingga terbukti bahwa pengadaan barang jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Pengaruh komitmen manajemen terhadap penyerapan anggaran, nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_4 diterima dan H_0 ditolak, sehingga terbukti bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Pengaruh lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran, nilai signifikan sebesar $0,015 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_4 diterima dan H_0 ditolak, sehingga terbukti bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Uji koefisien determinasi dalam regresi linear berganda, untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan *adjusted R²* sebagai koefisien determinasi. Berdasarkan hasil uji, nilai *adjusted R²* adalah 0,733 yang artinya penyerapan anggaran sebesar

73,3% dipengaruhi oleh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi sedangkan sisanya 26,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran memiliki nilai signifikan (p value) 0,012 yaitu dibawah nilai alpha (α) 0,05 menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sebagaimana hasil laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2013) bahwa besar kecilnya tingkat penyerapan belanja daerah dalam mendanai pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh proses perencanaan anggaran. Perencanaan yang buruk adalah hambatan yang signifikan mencegah penyerapan anggaran. Perencanaan anggaran memberi kontribusi besar terhadap penyerapan anggaran, sehingga semakin baik perencanaan anggaran akan semakin baik penyerapan anggaran. Dalam Pemerintahan Daerah teori *agency* berlaku antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota (*agent*) dan masyarakat (*principal*) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hubungan keagenan di Pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif (Pemerintah) adalah *agent* dan legislatif (DPRD) adalah *principal*. Sebelum penyusunan APBD dilakukan, terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang arah dan kebijakan umum serta prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

Eksekutif membuat rancangan APBD yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum

ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan hal ini merupakan bentuk kontrak yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sukadi (2012) yang memberikan hasil bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Demikian juga penelitian Malahayati (2015), memberikan hasil bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan anggaran, dengan nilai signifikan (p value) 0,020 yaitu dibawah nilai alpha (α) 0,05 sehingga pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Nilai koefisien regresi pelaksanaan anggaran sebesar 0,148 menunjukkan jika pelaksanaan anggaran semakin baik, maka semakin baik pula penyerapan anggaran.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan anggaran baru dapat dilaksanakan setelah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pelaksanaan anggaran merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pelaksanaan anggaran akan tercapai dengan baik apabila perencanaan anggaran sudah dilaksanakan dengan baik (Miliasih, 2012).

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan

aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011). Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Kedua hal tersebut mempengaruhi besar kecilnya penyerapan anggaran (Kuswoyo, 2011).

Pelaksanaan anggaran akan mempengaruhi penyerapan anggaran. Dalam perspektif teori *agency*, semakin baik pelaksanaan anggaran, maka penyerapan anggaran akan semakin baik. Hal ini akan mempengaruhi Organisasi Perangkat Daerah (*agent*) menjalankan tupoksinya sejalan dengan tujuan organisasi dan seperti yang diinginkan masyarakat (*principal*).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sukadi (2012) yang membuktikan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Begitu juga penelitian Malahayati (2015) memberikan hasil bahwa pelaksanaan anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Pengadaan Barang Jasa terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pada variabel pengadaan barang jasadengan nilai signifikan (ρ value) 0,034 yaitu dibawah nilai alpha (α) 0,05 membuktikan bahwa pengadaan barang jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Proses pengadaan barang jasa yang efektif dan efisien akan mempermudah proses penyerapan anggaran, dan berdampak pada mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Realisasi atas pembayaran kegiatan merupakan serapan anggaran

(Herriyanto, 2012). Proporsi anggaran pengadaan barang jasa lebih dari 30-40 persen (Indonesia Procurement Watch, 2011) porsi yang besar tersebut dikarenakan pengadaan barang jasa merupakan kegiatan Pemerintah yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian.

Kegagalan target penyerapan anggaran terkait pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh Pemerintah (*agent*) akan berakibat hilangnya manfaat belanja karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang berarti adanya uang menganggur (*idle money*). Hal ini apabila berkaitan dengan pembangunan fisik (sarana dan prasarana) untuk fasilitas umum maka dampak keterlambatan ini akan mengakibatkan keterlambatan atas manfaat yang akan diterima dan dinikmati oleh masyarakat sebagai pemberi amanah (*principal*). Pada organisasi pemerintah, penyerapan anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kinerja.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Kuswoyo (2011) yang membuktikan bahwa pengadaan barang jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Begitu juga penelitian Sukadi (2012) memberikan hasil bahwa pengadaan barang jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Komitmen Manajemen terhadap Penyerapan Anggaran.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa pada variabel komitmen manajemen, dengan nilai signifikan (ρ value) 0,001 yaitu dibawah nilai alpha (α) 0,05 membuktikan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Komitmen manajemen pada

OPD yang tinggi akan membantu percepatan penyerapan anggaran. Dukungan Kepala OPD sangat diperlukan untuk perbaikan penyerapan anggaran pada instansi yang dipimpinnya. Komitmen yang tinggi dari Kepala OPD sangat mempengaruhi penyerapan anggaran.

Komitmen manajemen merupakan kegiatan melakukan dan mempertahankan perilaku yang membantu bawahan untuk mencapai suatu tujuan (Cooper, 2006). Penekanan terhadap pelatihan, pemberdayaan dan penghargaan (Babakus *et al*, 2003), kontribusi berupa waktu yang diperlukan, sumber daya dan pendekatan positif terhadap proyek yang sedang dikerjakan (Marsh *et al*, 1998). Komitmen manajemen merupakan peran Kepala OPD selaku pengguna anggaran dengan berbagai upaya untuk mencapai target penyerapan anggaran yang maksimal. Penerima amanah dalam hal ini bawahan di OPD (*agent*) berdasarkan pendelegasian dari pemberi amanah dalam hal ini Kepala OPD (*principal*) dapat bekerja dengan baik karena diberikan kesempatan untuk mengadakan program kegiatan sesuai dengan kondisi Satuan Kerja sehingga diharapkan serapan anggaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Juliani (2014) yang memberikan hasil bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Pengaruh Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa variabel lingkungan birokrasi, dengan nilai signifikan (p value) 0,015 yaitu dibawah nilai alpha (α) 0,05 membuktikan bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh

positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Birokrasi merupakan alat atau mekanisme yang dibuat untuk kesuksesan dan efisiensi suatu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu (Eisenstadt, 1959). Kondisi atau keadaan yang ada pada pemerintah daerah akan sangat mempengaruhi berjalan lancar atau tidak kegiatan mereka. Lingkungan birokrasi yang baik akan membuat pelaksanaan kegiatan operasional menjadi lancar. Namun jika lingkungan birokrasi tidak mendukung kegiatan organisasi maka akan menghambat kinerja organisasi (Eisenstadt, 1959).

Oleh karena itu, lingkungan birokrasi akan mempengaruhi penyerapan anggaran. Semakin baik koordinasi dalam implementasinya antara penerima amanah (*agent*) dan pemberi amanah (*principal*) akan semakin memudahkan pemegang amanah (*agent*) dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah, sehingga diharapkan serapan anggaran dapat lebih cepat dilakukan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Juliani (2014) yang memberikan hasil bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Lingkungan birokrasi mempengaruhi penyerapan anggaran karena adanya dukungan dan kondusifitas kondisi dan keadaan di OPD dapat mendukung penyerapan anggaran menjadi lebih baik.

PENUTUP

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kota Kupang.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini agar Pemerintah Kota Kupang, dalam upaya untuk meningkatkan penyerapan anggaran diharapkan dapat memberikan perhatian yang serius terhadap permasalahan penyerapan anggaran, dengan cara terus memperbaiki proses perencanaan anggaran mulai dari penyusunan RKA sampai dengan Penetapan APBD, mempercepat proses pelaksanaan anggaran dengan cara menerbitkan SK Pejabat Perbendaharaan tepat waktu, tidak menunda pekerjaan, proses penyelesaian administrasi tepat waktu, dalam pelaksanaan anggaran mengacu pada DPA dan Anggaran Kas yang telah disahkan. Pemerintah juga harus melakukan proses pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meningkatkan komitmen manajemen dengan cara mendukung pelatihan/bimbingan teknis bagi para pegawai, menciptakan lingkungan birokrasi yang baik dengan cara menjalin koordinasi yang baik antar pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Babakus, E., U. Yavas, O. M. Karatepe, and T. Avci, 2003. *The Effect of Management Commitment to Service Quality on Employees' Affective and Performance Outcomes*. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 272-286.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- BPKP. 2011. *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta Review.
- Cooper, M. D. 2006. *Exploratory Analyses of the Effects of Managerial Support and Feedback Consequences on Behavioral Safety Maintenance*. *Journal of Organizational Behavior Management*, 1-41.
- Dharmanegara, Ida Bagus Agung. 2010. *Penganggaran Perusahaan. Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2013. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kursus Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Eisenhardt. M. Kathleen. 1989. *Agency Theory : An Assessment and Review*, *Academy of Management Review*.
- Eisenstadt, S. N. 1959. *Bureaucracy, Bureaucratization, and Debureaucratization*. *Administrative Science Quarterly*, 302-320.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi Keempat*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP.
- Halim, A. dan S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Heriyanto, Hendris. 2012. *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga di Wilayah Jakarta"*, Tesis, tidak diterbitkan (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012).

- Juliani. Dian. 2014. *Pengaruh Faktor-faktor Konstektual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa*. Tesis-Jurnal. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Kuncoro, Haryo. 2008. Variansi Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*. Vol. 1. No.2. Hal. 66-78
- Kuswoyo. 2011. *Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja diakhir Tahun Anggaran (Studi Pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri)*. Tesis-Abstrak. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Mardiasmo, 1999, *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*, PAU Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Priatno, A, P. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. Policy Paper Pusat Kebijakan APBN.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- _____. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Jakarta.
- _____. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah*. Jakarta
- _____. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Rodgers, R., J. E. Hunter, and D.L. Rogers. 1993. *Influences of Top Management Program Success*. *Journal of Applied Psychology*. 151-155.
- Ruwaida, Darwanis, Syukriy Abdullah. 2015. "Faktor-Faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran belanja pendidikan di Provinsi Aceh", *Jurnal Magister Manajemen*, Volume 4, No. 4, November 2015
- Sekaran, Uma. 2006. *Risearch Methods for Bussines*. Edisi 4 buku 1. Terjemahan Yon, Kwan. Jakarta: PT.Salemba Empat.

Sukadi. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Akhir Tahun Anggaran*. Tesis-Abstrak. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
<https://didicarsidiawan.wordpress.com/2009/04/29/mengungkap->

[penyebab-lambatnya-penyerapan-anggaran-belanja-pemerintah](#)

[http://www.perbendaharaan.go.id/new/?pilih=news&aksi=lihat&id=277.](http://www.perbendaharaan.go.id/new/?pilih=news&aksi=lihat&id=277)
[http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/content/pokok siklus apbn.pdf.](http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/content/pokok_siklus_apbn.pdf)